

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

“Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang biasanya disingkat dengan UMKM” di Indonesia merupakan penggerak perekonomian yang mampu menunjukkan ekstensinya dengan tetap *survive* dalam menghadapi perubahan dunia usaha sejak krisis moneter yang terjadi di Indonesia tahun 1998 dan dilanjutkan dengan krisis global pada tahun 2007 – 2008. Jenis usaha kecil ini didirikan secara pribadi atau keluarga. Berbagai jenis produk yang dihasilkan oleh UMKM di Indonesia baik pada sektor makanan dan minuman, mebel, fashion, dan sebagainya. Jika UMKM tidak melakukan inovasi dan pengembangan usahanya, maka bisa jadi banyak pelaku UMKM yang tidak bisa melanjutkan usahanya.

Di Indonesia UMKM mengalami perkembangan yang cukup baik. Perkembangan tersebut terlihat dari kontribusi yang diberikan. Pada Tahun 2014 – 2016 jumlah UMKM lebih dari 57.900.000 unit dan pada tahun 2017 jumlah UMKM diperkirakan berkembang sampai lebih dari 59.000.000 unit. Sekitar 88,8 – 9% bentuk usaha ASEAN adalah UMKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7 – 97,2%. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,9% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Oleh karena itu, kerja sama untuk meningkatkan dan mempertahankan UMKM perlu diutamakan.

Peningkatan jumlah UMKM di Indonesia menandakan masyarakat Indonesia memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi. Di jombang sendiri banyak masyarakat yang mendirikan usaha dengan berbagai bidang baik dengan skala mikro, kecil, dan menengah. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian di Indonesia. Dengan adanya sektor UMKM, pengangguran akibat angkatan kerja yang baik terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. (jombangkab.go.id)

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencatat kontribusi sektor UMKM meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%. Menyadari pentingnya kontribusi UMKM dalam meningkatkan perekonomian Indonesia pemerintah memberikan perhatian sangat besar terhadap perkembangan atau peningkatan UMKM. Berbagai inisiatif selalu diusahakan oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk meningkatkan kinerja UMKM sehingga dapat menghasilkan produk – produk yang berdaya saing tinggi.

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai beberapa program pengembangan kewirausahaan serta keunggulan kompetitif UMKM. Program tersebut adalah pelatihan kewirausahaan, pelatihan akuntansi UMKM, pelatihan pengembangan usaha UMKM, sosialisasi standar akuntansi serta pelatihan manajemen pengelolaan UMKM. Meskipun dukungan pemerintah semakin nyata dilakukan, berbagai tantangan menghadang para wirausahawan dalam

menjadikan UMKM berhasil. Salah satu tantangan yang dihadapi wirausahawan adalah terkait pengelolaan dana (modal). Ketidakberesan pengelolaan dana sering kali menjadi pemicu atau terjadinya permasalahan–permasalahan yang dapat berujung pada kegagalan UMKM. (Depkop.go.id)

Untuk pengembangan UMKM tentu saja membutuhkan dana yang cukup besar. Sebagian besar UMKM menggunakan dana pribadi dalam menjalankan usahanya, dan tidak adanya pemisahan antara uang pribadi dengan uang perusahaan. Padahal, untuk mengembangkan sebuah usaha menjadi lebih baik di butuhkan dana yang cukup besar dan pemisahan antara dana pribadi dengan dana perusahaan. Oleh sebab itu, tidak hanya modal pribadi saja yang dibutuhkan tetapi juga dana yang berasal dari pinjaman pada pihak ketiga, seperti : bank, KUR atau sejenisnya. (Dinas Koperasi dan UMKM, 2014: 12)

Ketidakberesan pengelolaan dana di sebabkan karena pelaku UMKM tidak melakukan pencatatan akuntansi dengan baik. Bahkan beberapa UMKM tidak melakukan pencatatan, baik berupa pencatatan kas keluar maupun kas masuk. Kewajiban menyelenggarakan pencatatan akuntansi yang baik bagi UMKM sebenarnya telah tersirat dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang “Usaha Mikro Kecil Menengah”. Namun, dalam prakteknya mayoritas pelaku UMKM jarang mencatat penerimaan dan pengeluaran dengan bukti

otentik, sehingga kesulitan untuk menghitung omset dan laba bersih secara tepat dengan menggunakan kaidah pembukuan.

Menurut peraturan bank Indonesia nomor 17/12/PBI/2015 pasal 5 mengenai “pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan UMKM dalam memberikan kredit atau pembiayaan UMKM yang menjadi salah satu persyaratannya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan yang disediakan UMKM”. Dalam menyusun laporan keuangan UMKM masih mengalami masalah. Mereka berpikir bahwa itu cukup sulit dan perlu diberikan pelatihan atau bantuan dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar. Setiap usaha mempunyai laporan keuangan yang bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan sehingga dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan yang baik tentulah mengikuti standar yang berlaku sesuai jenis usahanya, dengan laporan keuangan tersebut.

Laporan keuangan yang merupakan produk akhir dalam siklus akuntansi yang diolah dalam sistem akuntansi yang menjadi informasi yang dilaporkan yang secara mutlak harus dimiliki oleh UMKM. Apabila pelaku UMKM ingin mengembangkan usaha dengan mengajukan modal kepada para investor. Untuk itu, kebiasaan mencatat setiap transaksi usaha dan membuat laporan keuangan harus ditumbuhkan pada pelaku UMKM.

Pelaku UMKM mengetahui pentingnya pencatatan akuntansi, namun karena kurangnya pengetahuan akan akuntansi menyebabkan pelaku UMKM merasa kesulitan dalam melakukan pencatatan. Ditambah

lagi standar akuntansi yang digunakan adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Standar ini dirasa terlalu sulit diterapkan pada UMKM karena SAK ETAP dianggap masih terlalu kompleks dan tidak sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan UMKM. Mengingat terdapat lima laporan keuangan yang perlu dibuat, laporan tersebut terdiri dari ; laporan posisi keuangan, laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). ( Edward Tanujaya, 2016)

Menyadari fenomena yang terjadi pada sektor UMKM, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada tanggal 19 Mei 2009 yang berlaku efektif 1 Januari 2011 dengan penerapan dini diizinkan, IASB menyatakan bahwa *IFRS for SMEs* akan ditelaah setelah dua tahun entitas mengimplemetasikan standar tersebut. Selanjutnya IASB akan melakukan penelaahan per tiga tahun. Selain itu, IASB juga telah membentuk *IASB's SME Implementation Group* (SMEIG) dalam upaya memuthakirkan *IFRS for SMEs*. Pada tahun 2012, IASB telah memulai penelaahan komprehensif atas *IFRS for SMEs* dan Amendemen *IFRS for SMEs* disahkan pada tahun 2015 untuk berlaku efektif 1 Januari 2017 dengan penerapan dini diizinkan.

Melihat perkembangan UMKM dalam menciptakan lapangan kerja serta memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan,

pemerintah Kota Jombang maupun pihak swasta memberikan dukungan salah satunya yaitu dukungan finansial untuk mendapatkan kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Hasil survey awal diperoleh informasi bahwa pelaku UMKM Kota Jombang belum memiliki pengetahuan tentang akuntansi dan pencatatan keuangan yang dilakukan masih sangat sederhana. Sehingga penulis ingin mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan Pada UMKM”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan pada UMKM ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian maka penulis memberikan batasan masalah sebagai ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. UMKM masih belum menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar yang berlaku, dalam hal ini SAK ETAP.
2. Analisis yang dilakukan UMKM periode 2017
3. Penelitian pada UMKM pengerajin manik-manik di Kecamatan Gudo

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui implementasi SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan pada UMKM Pengerajin Manik-Manik.
2. Untuk membantu pelaku bisnis UMKM dalam memahami penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a) Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk pemahaman diri penulis dalam menganalisa suatu permasalahan secara ilmiah dan sistematis dalam bentuk penulisan skripsi.
  - b) Bagi peneliti dan pihak – pihak yang memerlukan, dapat digunakan sebagai sumber referensi dan informasi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a) Bagi UMKM, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.

